

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH TAHUN AJARAN 2006/2007

(Studi pada SMK Cokroaminoto 1 Surakarta)¹⁾

Oleh: Fatimah, Sri Witurachmi, Sohidin²⁾

ABSTRACT

This research aims to describe education fund management in SMK Cokroaminoto 1 of Surakarta, to know effectiveness of education fund management in SMK Cokroaminoto 1 of Surakarta, its problems, and also the effort solve the problem. This research was conducted at SMK Cokroaminoto 1 Surakarta. Data were collected by using interview, document, and observation, and then analyzed qualitative. The technique of data analysis which are used are interactive analysis model which consists of three main components, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. While, source triangulation and method triangulation are used for examining the data validity.

Based on the analysis results and discussion, it can be concluded are as follows a) Fund management in SMK Cokroaminoto 1 of Surakarta can be divided into three phases, namely planning, implementation, and evaluation. In the phase of planning and evaluation is usually held a meeting to determine/ arrange polices and responsibility for implementing work and estimation program. While, the implementation of fund management is done based on the rule which has been made by the supervising and policies of head master. b) Fund management in SMK Cokroaminoto 1 Surakarta has not been fully effective. c) The biggest problems faced by its school is the delay of payment from the parents.

Keywords: *School Based Management, effectiveness, fund management.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Reformasi yang dimulai tahun 1998 mengakibatkan sejumlah tuntutan diantaranya tentang Otonomi Daerah yang ditetapkan dalam UU No. 22 Tahun 1999. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dari Undang-undang tersebut, ditetapkan juga UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dengan ditetapkannya undang-undang ini mengakibatkan perubahan dalam kewenangan daerah, yakni daerah memiliki otonomi yang lebih luas. Otonomi yang luas tersebut mencakup kewenangan dan keleluasaan pemerintah daerah dalam melaksanakan seluruh bidang kehidupan, kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta bidang yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Otonomi Daerah yang telah resmi dilaksanakan sejak tahun 2001 juga membawa perubahan dalam pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang tadinya sentralistik bergeser menjadi desentralistik. Sistem yang sentralistik menyebabkan tidak terakomodasinya perbedaan keragaman, kepentingan

daerah, sekolah, maupun kepentingan peserta didik. Dengan adanya desentralisasi pendidikan diharapkan dapat menanggulangi masalah mutu, pemerataan, relevansi, efisiensi, dan manajemen.

Pergeseran pembangunan dari sentralistik menjadi desentralistik melalui otonomi daerah menyebabkan sejumlah tantangan dalam bidang pendidikan. Setiap daerah menghadapi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kemampuan sekolah dalam menjamin anggaran sekolah, sumber daya manusia yang bermutu, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah dalam jumlah yang mencukupi dan memenuhi syarat, manajemen sekolah yang kuat, dan partisipasi orang tua.

Sejalan dengan berkembangnya manajemen pendidikan, dalam lingkup pendidikan formal mulai muncul Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Munculnya MBS menjadikan pengelolaan pendidikan lebih terarah dan terkoordinasi baik dari segi penyelenggaraan, pendanaan, pengembangan, dan pengawasan. MBS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, relevansi, pemerataan, dan mutu

1) Artikel Penelitian

2) BKK Pendidikan Akuntansi Program Studi Pendidikan Ekonomi J.PIPS FKIP UNS

pendidikan serta memenuhi asas keadilan dan demokratisasi.

Dalam penerapan MBS, terdapat beberapa fungsi yang didesentralisasikan kepada sekolah yaitu kurikulum dan program pengajaran; tenaga kependidikan; kesiswaan; keuangan; sarana dan prasarana pendidikan; pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat; serta manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan.

Salah satu fungsi yang didesentralisasikan kepada sekolah adalah manajemen keuangan sekolah. Dalam MBS, sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta bertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam pembahasan manajemen keuangan sekolah, khususnya pengelolaan dana pendidikan, tidak terlepas dari pembahasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Dengan adanya anggaran ini, maka dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan dana di sekolah.

Pada saat sekarang ini konsep MBS telah diterapkan di semua SMA/ SMK di Surakarta, salah satu sekolah yang telah menerapkan konsep tersebut adalah SMK Cokroaminoto 1 Surakarta. Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah tersebut, SMK Cokroaminoto 1 Surakarta mengupayakan pelaksanaan berbagai fungsi yang telah didesentralisasikan tersebut dengan melakukan perbaikan secara terus menerus. Salah satu komponen yang sedang diupayakan adalah adanya pengelolaan keuangan sekolah yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada semua *stakeholder*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis menyusun penelitian ini dengan judul "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH TAHUN AJARAN 2006/2007 (STUDI PADA SMK COKROAMINOTO 1 SURAKARTA)".

Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan dana pendidikan yang dilaksanakan di sekolah tersebut?
2. Bagaimanakah efektivitas pengelolaan dana pendidikan di sekolah tersebut?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana pendidikan di sekolah tersebut?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengelolaan dana pendidikan di sekolah tersebut.
2. Mengetahui efektivitas pengelolaan dana pendidikan di sekolah tersebut.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dana pendidikan di sekolah tersebut.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik teoretis maupun praktis berikut ini:

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan bidang pendidikan, khususnya pengelolaan manajemen keuangan sekolah.
2. Bagi Sekolah, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi sekolah untuk menentukan kebijakan yang akan ditetapkan selanjutnya.
3. Bagi Program Pendidikan Ekonomi BKK Akuntansi yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan dana pendidikan serta dapat digunakan sebagai landasan dalam penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain.
4. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan dana pendidikan.

LANDASAN TEORI

Tinjauan Pustaka

1. Pengelolaan Dana Pendidikan dalam Rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

MBS adalah suatu model manajemen yang memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan sekolah dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu sekolah.

Berkaitan dengan ruang lingkup MBS, E. Mulyasa (2005: 39) mengemukakan bahwa, "Sedikitnya terdapat tujuh komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik dalam rangka manajemen berbasis sekolah yaitu kurikulum dan program pengajaran; tenaga kependidikan; kesiswaan; keuangan; sarana dan prasarana pendidikan; pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat; serta manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan."

Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dibutuhkan dana. Kebutuhan akan dana ini harus dipenuhi agar pelaksanaan program pendidikan berjalan lancar. Dalam rangka MBS, sekolah diharapkan mempunyai kemampuan untuk merencanakan, mengelola, dan bertanggung jawabkan pengelolaan dana pendidikan tersebut terhadap *stakeholders*.

Menurut Indra Bastian (2007: 90), "Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan." Untuk mengelola dana ini harus didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Hal ini telah diatur dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 48 ayat (1) tentang Pengelolaan Dana Pendidikan menyatakan bahwa "Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas Publik."

Dalam membahas pengelolaan dana ini penulis membagi pengelolaan dana pendidikan menjadi tiga bagian sebagaimana yang dikemukakan oleh Jones dalam Mulyasa (2005: 49) yaitu

Perencanaan, yaitu kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia; tahap **pelaksanaan** anggaran yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan adanya penyesuaian jika diperlukan; dan tahap akhir yaitu **evaluasi**

yakni penilaian terhadap pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan.

a. Perencanaan Pengelolaan Dana

"Perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah." (Mulyasa, 2005: 173). Dalam perencanaan pengelolaan dana ini bertitik tolak dari APBS. Maka perencanaan pengelolaan dana juga membahas tentang pembuatan rancangan APBS. Penyusunan anggaran merupakan tahap yang dilakukan setelah menyusun program kerja sekolah, jadi penyusunan anggaran harus berdasarkan program sekolah yang telah dibuat. Hal ini juga ditegaskan oleh Mulyadi (2007: 597) yang mengemukakan bahwa

Anggaran pada dasarnya merupakan irisan tahun berbagai program yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam tahun anggaran tertentu. Kumpulan berbagai kegiatan yang dicantumkan dalam berbagai program yang akan dilaksanakan dalam tahun tertentu merupakan rencana kegiatan yang dimasukkan dalam anggaran.

Selama ini penyusunan APBS lebih banyak dilakukan oleh kepala sekolah dan pemilik sekolah (untuk swasta yayasan penyelenggara pendidikan) dan untuk kegiatan-kegiatan tertentu melibatkan komite sekolah. Dalam rangka MBS maka untuk penyusunan APBS harus melibatkan guru dan wali murid serta wakil masyarakat.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Pendidikan

"Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien." (Mulyasa, 2005: 21). Dalam pengelolaan dana pendidikan, setelah program dan anggaran disusun dan disahkan, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan berbagai program tersebut.

c. Evaluasi Pengelolaan Dana Pendidikan

Langkah terakhir dari pengelolaan dana adalah evaluasi bagaimana

anggaran dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas sekolah. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Wahjosumidjo (2005: 319) maka dalam evaluasi ini dilakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan, membuat perbandingan antara target dan realisasi anggaran, serta merekomendasikan penyesuaian dan perubahan yang akan datang.

2. Kriteria Efektivitas Pengelolaan Dana Pendidikan

Dalam penelitian ini, menggunakan teori sistem dimana fokus yang dikaji yaitu *input*, *proses*, dan *output*. Tiap-tiap fokus penelitian tersebut dikaji lebih dalam dengan menetapkan aspek kajian sebagai berikut.

1. Input dalam anggaran, aspek kajiannya yaitu sumber-sumber pendapatan yang diperoleh sekolah, pengalokasian untuk program yang ditetapkan oleh sekolah (RAPBS), identifikasi kebutuhan dan tujuan, persetujuan sasaran, pembuatan program yang relevan.
2. Proses pengelolaan dana ini mencakup implementasi manajemen keuangan sekolah dalam pengelolaan dana pendidikan. Dalam proses pengelolaan ini dimungkinkan terjadi pengawasan dan penyesuaian-penyesuaian bila diperlukan dengan catatan tidak terlalu sering melakukan penyesuaian dan tetap berusaha melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Output dalam penelitian ini mempunyai aspek kajian mencakup RAPBS serta laporan pertanggung jawaban atau laporan keuangan yang diterbitkan pada akhir periode anggaran, serta evaluasi pencapaian tujuan.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan dana pendidikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Ketepatan penyusunan program yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara baik dan jelas untuk tiap-tiap bagian.

3. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana, dapat mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi tanpa perlu adanya perombakan yang besar.
4. Ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan.
5. Dalam pengelolaan dana tersebut dapat menghasilkan keluaran/ laporan yang efektif baik ditinjau dari hasil penerimaan, waktu, biaya, untuk menyelenggarakan program dan kualitas informasi yang diberikan.

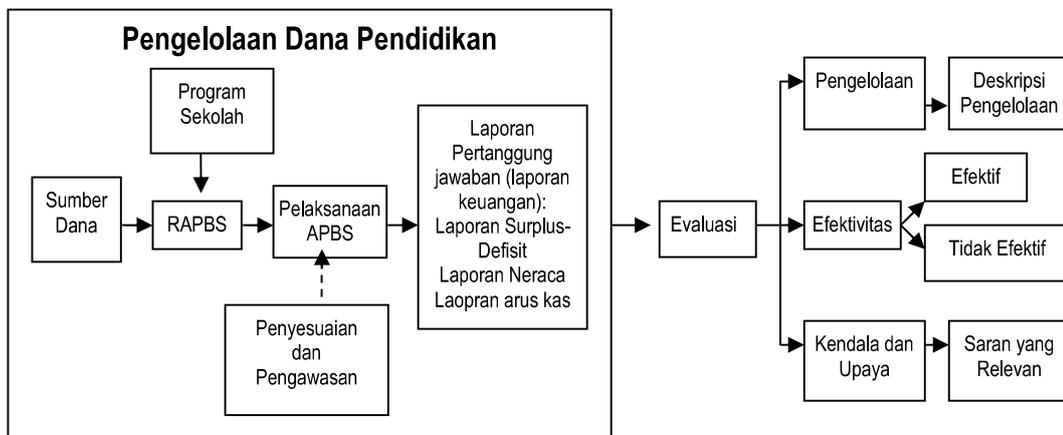
Kerangka Pemikiran

Manajemen keuangan sekolah, khususnya masalah pengelolaan dana perlu mendapat kajian tersendiri karena komponen ini berperan penting dalam keberhasilan setiap usaha pendidikan. Dana ini berfungsi untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana, seperti tanah, bangunan, laboratorium, perpustakaan, media belajar, operasional pengajaran, pelayanan administrasi, dsb. Dalam mengelola dana, sekolah dituntut untuk mempunyai kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan.

Perencanaan keuangan merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan.

Sedangkan pelaksanaan anggaran ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. Dan tahap evaluasi merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian dan sasaran.

Pada tahap perencanaan, sekolah membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan setelah disetujui, disahkan menjadi APBS. Salah satu fungsi anggaran adalah sebagai alat untuk mengukur efektivitas atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur efektivitas ini, dapat digunakan teori sistem, dalam teori ini harus melibatkan semua *input-proses-output*. Untuk lebih jelasnya penulis gambarkan kerangka berpikir sebagai berikut.



Kerangka Berfikir tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Pendidikan

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SMK Cokroaminoto 1 Surakarta dengan pertimbangan:

1. Sekolah tersebut telah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah.
2. Kepala Sekolah memberikan kemudahan dalam hal perijinan.
3. Sekolah tersebut mempunyai data atau informasi yang memadai untuk keperluan penelitian.

Waktu penelitian selama 5 bulan dimulai bulan Februari 2008 sampai dengan Juni 2008.

Bentuk dan Strategi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif dan strategi penelitian tunggal terpancang.

Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah narasumber/informan, serta dokumen dan arsip.

Teknik Sampling

Pengambilan sampel dilakukan secara non probabilitas (pemilihan non random) dengan metode purposive sampling.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Validitas Data

Untuk menjamin validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif (interactive model of analysis).

HASIL PENELITIAN

1. Pengelolaan Dana Pendidikan dalam Rangka MBS di SMK Cokroaminoto 1 Surakarta

a. Perencanaan Pengelolaan Dana Pendidikan

Perencanaan pengelolaan dana di diadakan tiap tahun, dalam perencanaan tersebut Kepala Sekolah melibatkan Kapro, Kepala Tata Usaha, Waka-waka guna menyusun program kerja dan anggaran yang akan ditetapkan.

Sekolah ini telah mempunyai visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu "Menjadi SMK unggul dalam prestasi yang dilandasi iman dan taqwa serta menghasilkan tamatan yang mampu bersaing pada tingkat nasional dan global". Sedangkan misi yang ditetapkan yaitu

1. Menumbuhkan semangat keunggulan dan kompetitif secara intensif kepada seluruh warga sekolah.
2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara optimal yang berorientasi kepada pencapaian

kompetensi berstandar nasional dan internasional dengan tetap mempertimbangkan potensi yang dimiliki peserta didik.

3. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sebagai sumber kearifan dalam bertindak.
4. Mengembangkan dan mengintensifkan hubungan sekolah dengan dunia usaha industri dan industri lain yang berskala nasional dan internasional.
5. Penerapan manajemen pengelolaan mengacu standar ISO 9001:2000 dengan melibatkan seluruh warga sekolah.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka sekolah menetapkan berbagai program kerja yang didasarkan pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekolah ini mempunyai beberapa kegiatan sekolah yang dapat dibedakan menjadi kegiatan sekolah yang secara langsung berhubungan dengan siswa dan kegiatan sekolah yang lain, seperti pembinaan sekolah yang mencakup pengembangan kurikulum, supervisi, rakerdin, pembinaan kepala sekolah, guru, kegiatan operasional sekolah, dsb. Untuk tahun ajaran 2006/2007 sekolah menetapkan 40 program kerja untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan siswa.

Perumusan anggaran berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan. Untuk anggaran tahun 2006/2007 ditetapkan sebesar Rp. 473.339.000,00 yang mencakup kegiatan yang langsung berhubungan dengan siswa dan kegiatan sekolah yang lain.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Pendidikan

Pelaksanaan pengelolaan dana pendidikan didasarkan pada program kerja dan anggaran yang telah dibuat, pengelolaan dana tersebut dilaksanakan oleh bendahara dan diawasi oleh kepala sekolah, sedangkan untuk bantuan tertentu dibentuk tim yang khusus mengelola dana tersebut. Jika terjadi perubahan dalam pelaksanaan anggaran maupun program kerja, maka kepala sekolah langsung mengambil kebijakan dan mengumumkan-

nya pada semua pihak yang berkepentingan dengan mengemukakan alasan perubahan yang dilaksanakan. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dana, bendahara diwajibkan untuk membuat laporan keuangan harian, bulanan, dan tahunan.

c. Evaluasi Pengelolaan Dana Pendidikan

Evaluasi pengelolaan dana di sekolah tersebut dilaksanakan tiap tahun. Berdasarkan RAPBS dan laporan keuangan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa kualitas laporan keuangan yang dihasilkan belum begitu baik, hal ini dapat dilihat dari kurang transparannya laporan yang dibuat dengan selisih mencapai Rp.321.759.000,00, dari yang direncanakan Rp.473.339.000,00 yang terrealisasi hanya Rp.151.580.000,00. Jika dicermati lebih lanjut, dalam laporan tersebut belum dilaporkan keseluruhan pos yang terrealisasi dan tidak disertakannya catatan keuangan lain yang dapat menjadi penjelasan atas pos-pos tersebut dalam laporan keuangan yang telah dibuat.

2. Efektivitas Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Cokroaminoto 1 Surakarta

Pengelolaan dana pendidikan di sekolah tersebut dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif, hal itu dapat dilihat dari berbagai aspek berikut.

a. Dari Segi Input

Dari segi input, pengelolaan dana pendidikan dapat ditinjau dari kesesuaian program kerja dengan kebutuhan sekolah dan *stakeholders* serta penerimaan sumber-sumber pendapatan sekolah. Jika ditinjau dari kesesuaian program kerja dengan kebutuhan sekolah dan *stakeholders* dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana sudah efektif karena penyusunan program kerja telah disesuaikan dengan kurikulum dan kebutuhan sekolah serta *stakeholders*.

Namun apabila ditinjau dari penerimaan sumber-sumber pendapatan sekolah, pengelolaan dana pendidikan belum efektif karena sumber-sumber pendapatan tidak dapat mencapai target yang diharapkan dan tidak dapat diterima tepat pada

waktunya. Berdasarkan Laporan keuangan yang dibuat dan RABS terdapat selisih yang besar untuk pos penerimaan ini yaitu Rp. 321.759.000,00, dari yang direncanakan Rp. 473.339.000,00 yang terrealisasi hanya Rp.151.580.000,00, secara faktual selisih yang terjadi tidak sebesar itu, hal ini dikarenakan kualitas laporan keuangan yang dibuat kurang baik., kurang transparan dan banyak pos yang terrealisasi namun tidak dilaporkan, serta laporan keuangan yang tidak tersimpan dengan rapih sehingga tidak selalu ada pada saat dibutuhkan.

b. Dari Segi Proses

Ditinjau dari segi prosesnya, pengelolaan dana pendidikan belum efektif jika ditinjau dari pelaksanaan pengelolaan dana. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa bagian yang melaksanakan kegiatan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Walaupun demikian sebenarnya telah disusun pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara baik dan jelas untuk tiap-tiap bagian. Sedangkan dalam mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi dapat dikatakan cukup efektif karena tidak memerlukan perombakan yang besar.

c. Dari Segi Output

Dari segi output, pengelolaan dana pendidikan dapat ditinjau dari beberapa hal yaitu waktu pelaporan, biaya untuk menyelenggarakan pengelolaan dana, dan kualitas informasi yang diberikan. Jika dilihat dari waktu pelaporan dan biaya untuk menyelenggarakan pengelolaan dana maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana sudah cukup efektif karena pelaporan tepat waktu dan biaya untuk mengelola dana pendidikan relatif murah. Sedangkan jika dilihat dari kualitas informasi yang diberikan maka pengelolaan dana pendidikan dapat dikatakan belum efektif karena kurangnya transparansi dalam laporan keuangan, yakni dalam laporan yang dibuat belum dilaporkan keseluruhan pos yang terrealisasi dan tidak disertakannya catatan keuangan lain yang dapat menjadi penjelasan atas pos-pos tersebut.

Untuk pencapaian target dalam program kerja efektif karena sebagian besar dapat

terlaksana dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Namun dalam realisasi anggaran untuk pos penerimaan belum maksimal.

3. Kendala dan Upaya Pengelolaan Dana Pendidikan

Dalam pengelolaan dana pendidikan di sekolah tersebut ditemui kendala yaitu masalah pendapatan (SPP) yang tidak tepat waktu. Keterlambatan perolehan dana merupakan hal yang serius, karena apabila perolehan dana tidak lancar maka kegiatan yang memerlukan dana tersebut juga tidak dapat terlaksana dengan baik. Untuk menanggulangi hal tersebut antara lain diadakan beasiswa-beasiswa dan Bantuan Khusus Murid (BKM), dimana dana tersebut diperoleh dari pemerintah.

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana pendidikan di sekolah tersebut dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan dan evaluasi ini biasanya dilaksanakan rapat untuk menetapkan/menyusun kebijakan-kebijakan serta pertanggung jawaban atas pelaksanaan program kerja dan anggaran. Sedangkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah dibuat dengan pengawasan dan kebijakan dari Kepala Sekolah.
2. Pengelolaan dana pendidikan di sekolah tersebut belum sepenuhnya efektif. Hal ini ditinjau dari segi input, proses, dan output. Lebih lanjut berdasarkan kriteria efektivitas yang telah ditetapkan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika dilihat dari kesesuaian program kerja dengan kebutuhan sekolah dan *stakeholder*, kemampuan dalam mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi, waktu pelaporan, biaya untuk menyelenggarakan pengelolaan dana, pencapaian program kerja maka pengelolaan dana cukup efektif. Sedangkan jika dilihat dari penerimaan sumber-sumber pendapatan sekolah,

- kualitas informasi yang diberikan, dan realisasi anggaran pencapaian target belum sepenuhnya efektif.
3. Dalam pengelolaan dana pendidikan di sekolah tersebut ditemui kendala yaitu masalah pendapatan (SPP) yang tidak tepat waktu. Untuk menanggulangi hal tersebut antara lain diadakan beasiswa-beasiswa dan Bantuan Khusus Murid (BKM), dimana dana tersebut diperoleh dari pemerintah.

IMPLIKASI

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan, maka dapat dikaji implikasi teoretis dan implikasi praktisnya.

1. Implikasi Teoretis

Berdasarkan hasil temuan studi, maka dapat dikaji secara teoretis bahwa pengelolaan dana pendidikan sangat penting dilakukan untuk memperlancar kegiatan operasional sekolah. Secara umum pengelolaan dana pendidikan ini terdiri dari tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam rangka MBS untuk penyusunan APBS harus melibatkan guru dan wali murid serta wakil masyarakat. Untuk pelaksanaan tiap-tiap tahap tersebut harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada semua *stakeholders*.

2. Implikasi Praktis

Sekolah tersebut telah menerapkan pengelolaan dana pendidikan dengan cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki yaitu usaha untuk memperoleh sumber-sumber dana secara tepat waktu dan kualitas laporan yang dipublikasikan kepada *stakeholders*. Kendala tersebut harus segera diatasi supaya pelaksanaan pengelolaan dana dapat berjalan dengan efektif, sehingga dapat membantu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat mengajukan saran tentang pengelolaan dana pendidikan sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Sekolah

- a. Kepala sekolah hendaknya lebih aktif untuk mengajak semua komponen untuk terlibat dalam membuat kebijakan sekolah.
- b. Kepala sekolah hendaknya lebih teliti dalam menentukan kebijakan dan prioritas, baik prioritas pemerintah maupun prioritas sekolah.
- c. Kepala sekolah lebih aktif untuk menambah sarana dan prasarana yaitu melalui pengajuan kepada pemerintah, yayasan, maupun kerjasama dengan komite.
- d. Kepala sekolah lebih aktif dan kreatif dalam mencari dana tambahan, sehingga pendapatan tidak hanya bergantung dari SPP.
- e. Kepala sekolah hendaknya berusaha melaksanakan perencanaan, pengelolaan, serta evaluasi program dan anggaran secara efektif dan efisien.

2. Bagi Bendahara

- a. Bendahara hendaknya aktif mengikuti seminar, pelatihan, lokakarya untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya.
- b. Bendahara hendaknya membuat tambahan catatan/ dokumen yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, seperti laporan neraca, laporan arus kas, dsb.

3. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah hendaknya memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan akan sarana prasarana sehingga dapat menunjang kegiatan belajar mengajar.
- b. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi pengelolaan dana yang efektif dan efisien bagi sekolah-sekolah di daerah, sehingga pengelolaan dana dapat lebih efisien dan efektif.
- c. Pemerintah hendaknya melakukan pemantauan terhadap jalannya pengelolaan dana pendidikan secara intensif, agar pelaksanaan pengelolaan dana pendidikan di daerah dapat berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. 2005. *Pedoman MBS*. Surabaya: CV Catur Tama Jaya.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi 2*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hari Suderajat. 2005. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Bandung: CV Cipta Cekas Grafika.
- Hasibuan, S.P. 2005. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Heckert, JB. 1995. *Controllershship: Tugas Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Indra Bastian. 2007. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.
- Karnadi dkk. 2005. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: BP Cipta Jaya.
- Lexy J. Moleong,. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardalis. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa, E. 2005. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurkolis. 2005. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Grasindo.
- Purwanto Gatot Purdiyatomoko. 2007. "Efektivitas MBS pada Sekolah Dasar Rintisan di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri." *Tesis Pasca Sarjana UNS*.
- Sondang P Siagian. 2005. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharsimi Arikunto. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutopo, HB. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Wagiran Didik Nurhadiyanto. 2004. "Pembiayaan SMK Negeri dan Swasta di DIY dalam Era Otonomi." *Jurnal Kependidikan Tahun XXXIV. Nomor 1: 54-68*.
- Wahjosumidjo. 2005. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yohannes Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jogja: Graha Ilmu.